

2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



*Diskominfo*  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# RENCANA KERJA

## TAHUN 2025

### RANCANGAN AKHIR

---

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. RENJA ini merupakan rencana kerja tahunan ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan acuan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya RENJA tahun 2024 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika lebih konkrit.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Harapan kami, RENJA ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
SOLIHIN, S.Sos., MT  
Pembina TK. I (IV/b)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU</b> .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara .....	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika .....	28

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas	
Komunikasi dan Informatika .....	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	46
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan	
Informatika.....	51
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>52</b>
4.1. Program dan Kegiatan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap

memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Pelaksanaan kegiatan Diskominfo Tahun 2023 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo 2023, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2024. Adapun Evaluasi terhadap Capaian Program Kegiatan tahun 2023 sebagai Berikut :

**1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tidak ada Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

**2) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Kegiatan :** Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Target 10 Dokumen Realisasi 10 Dokumen (100%)

**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target 912 Orang/Bulan Realisasi 899 Orang/Bulan (98,57%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

**Kegiatan :** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

**Kegiatan :** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Target 4 Paket, Realisasi 4 Paket (100%)
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target 66 Orang Realisasi 66 Orang (100%)

**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target 2 Paket Realisasi 2 Paket (100%)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Target 1 Paket Realisasi 1 Paket (100%)
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Target 50 Laporan Realisasi 49 Laporan (98%)
- e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

**Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 6 Unit Realisasi 6 Unit (100%)
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 93 Unit Realisasi 93 Unit (100%)

**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Target 4 Laporan Realisasi 4 Laporan (100%)

**Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Target 36 Unit Realisasi 35 Unit (97,22%)
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Target 3 Unit Realisasi 3 Unit (100%)
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Target 147 Unit Realisasi 147 Unit (100%)

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**Kegiatan** : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan** :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Target 8 Dokumen Realisasi 8 Dokumen (100%)
- e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Target 3 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (100%)
- f. Pelayanan Informasi Publik Target 5 Dokumen Realisasi 5 Dokumen (100%)
- g. Layanan Hubungan Media Target 250 Layanan Realisasi 250 Layanan (100%)
- h. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Target 100 Dokumen Realisasi 100 Dokumen (100%)
- i. Manajemen Komunikasi Krisis Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
- j. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (100%)
- k. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Target 6 Dokumen Realisasi 6 Dokumen (100%)

## **3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

**Kegiatan** : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Target 1 Unit Realisasi 1 Unit (100%)
- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Target 2 Unit Realisasi 2 unit (100%)
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Target 4 Dokumen Realisasi 3 Dokumen (75%)
- d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Target 16 Dokumen Realisasi 16 Dokumen (100%)
- e. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Target 66 Dokumen Realisasi 60 Dokumen (90,91%)
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

**Kegiatan :** Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Target 61 Unit Realisasi 61 Unit (100%)

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

**Kegiatan :** Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan :**

- a. Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Target 130 Orang Realisasi 130 Orang (100%)
- c. Membangun Metadata Statistik Sektoral Target 4 Dokumen Realisasi 4 Dokumen (100%)
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Target 116 Orang Realisasi 116 Orang (100%)
- e. Pengembangan Infrastruktur Target 18 Unit Realisasi 18 Unit (100%)
- f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Target 2 Dokumen Realisasi 2 Dokumen (100%)

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**Kegiatan :** Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan (100%)
- c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

**Kegiatan :** Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota

**Sub Kegiatan :**

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Target 1 Perangkat Daerah Realisasi 1 Perangkat Daerah (100%)

**3) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tidak ada Program Kegiatan yang melebihi target Kinerja

**4) Adapun Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Target Kinerja Program Kegiatan antara lain :**

Secara umum Target Kinerja Program Kegiatan tidak memiliki kendala atau permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kinerja Program Kegiatan, hanya beberapa permasalahan terkait Terlambatnya Regulasi yang menyebabkan terlambatnya Proses pelaksanaan kegiatan, tidak terlaksananya Forum Lintas Perangkat Daerah, Kompetensi SDM yang belum menyeluruh

**1) Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Adanya Permasalahan – Permasalahan diatas, tidak berimplikasi langsung terhadap target Kinerja beberapa Program / Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.

**2) Kebijakan / tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut**

- Mempercepat penyusunan Draft Regulasi untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah
- Meningkatkan Kompetensi SDM baik melalui Pelatihan/Bimtek maupun Sosialisasi

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**dan Pencapaian Renstr-PD s/d Tahun 2024 ( Tahun Berjalan )**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)	
										Target Renja-PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Relalisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Target Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
2	16	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>91,00</b>	<b>79,18</b>	<b>82,00</b>	<b>79,18</b>	<b>96,56</b>	<b>82,00</b>	<b>84,00</b>	<b>92,31</b>
	16	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,00</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>51,43</b>
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	35	6	6	6	100,00	7	19	54,29
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	70	12	10	10	100,00	14	36	51,43

<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	<b>Laporan</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>80,00</b>
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	4.920	984	912	899	98,57	984	2.867	58,27
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	4	4	4	100,00	3	11	73,33
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>60,00</b>
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>60,00</b>
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	75	10	66	66	100,00	10	86	114,67
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Layanan</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>60,00</b>
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	50	50	50	100,00	50	150	60,00
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1	6	6	100,00	100	107	107,00
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	125	25	93	93	100,00	100	218	218,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>45,00</b>
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	3	4	4	100,00	3	10	66,67

2	16	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>60,00</b>
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110	22	36	35	97,22	22	79	71,82
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	3	3	100,00	1	5	100,00
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	15	147	147	100,00	15	177	295,00
2	16	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	16	2	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>4.200</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,00</b>	<b>840</b>	<b>2.520</b>	<b>60,00</b>
2	16	2	02.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	10	2	2	2	100,00	1	5	50,00
2	16	2	02.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	10	-	2	2	100,00	2	4	40,00

2	16	2	02.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	10	-	2	2	100,00	1	3	30,00
2	16	2	02.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	40	-	8	8	100,00	3	11	27,50
2	16	2	0,08402778	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
2	16	2	02.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
2	16	2	0,08402778	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	310	41	250	250	100,00	3	294	94,84
2	16	2	02.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1.000	100	100	100	100,00	200	400	40,00
2	16	2	02.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	600	100	-	-	-	120	220	36,67
2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	30	6	6	6	100,00	6	18	60,00
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang mengelola e-government</b>	<b>OPD</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>
2	16	3	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	Dokumen	30	3	6	6	100,00	-	9	30,00
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	14	6	2	2	100,00	2	10	71,43
2	16	3	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	10	3	4	3	75,00	2	8	80,00
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	46	6	16	16	100,00	3	25	54,35

2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	90	6	66	60	90,91	6	72	80,00
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	16	3	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi yang dikelola</b>	<b>Sistem Informasi</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	16	3	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	150	30	61	61	100,00	23	114	76,00
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>		<b>Nilai</b>								
2	20	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	20	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>OPD</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>
2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	6	2	2	2	100,00	1	5	83,33

2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	680	116	135	135	100,00	130	381	56,03
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	5	1	2	2	100,00	1	4	80,00
2	20	2	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	348	116	116	116	100,00	116	348	100,00
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	50	18	18	18	100,00	-	36	72,00
2	20	2	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	Dokumen	6	1	2	2	100,00	1	4	66,67
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>		<b>Nilai</b>								
2	21	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,97</b>	<b>18,97</b>	<b>100,00</b>
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	58	-	-	-	-	11	11	18,97
2	21	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	3	1	-	-	-	1	2	66,67

2	21	2	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	21	2	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	21	2	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2	21	2	2.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota</b>	<b>Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah</b>	<b>Layanan JKS</b>	<b>5</b>	<b>-</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20,00</b>
2	21	2	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Layanan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kab. Kutai Kartanegara**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks SPBE			3,00	3,10	3,15	3,20	1,94	2,54	3,15	3,20	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			3,10	3,15	3,20	3,22	1,50	1,40	3,20	3,22	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
3	Indeks Domain Layanan SPBE			2,96	3,01	3,06	3,11	2,71	3,51	3,06	3,11	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
4	Indeks Domain Manajemen SPBE			3,25	3,30	3,35	3,40	1,00	1,00	3,35	3,40	Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari

													tahun 2022
5	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE			3,05	3,10	3,15	3,20	1,30	3,30	3,15	3,20		Capaian Kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			82,00	84,00	86,00	88,00	93,95	-	86,00	88,00		Capaian Kinerja pada tahun 2022 melebihi dari target kinerja sedangkan tahun 2023 nilainya belum keluar
7	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00		Capaian sesuai dengan target kinerja
8	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00		Capaian sesuai dengan target kinerja
9	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00		Capaian sesuai dengan target kinerja
10	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi			10,00	18,97	37,93	56,89	18,97	-	37,93	56,89		Capaian sesuai dengan target kinerja
11	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21	21	21	21	21	-	21	21		Capaian sesuai dengan target kinerja

12	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			2	2	2	2	2	-	2	2	Capaian sesuai dengan target kinerja
13	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			4	4	4	4	4	-	4	4	Capaian sesuai dengan target kinerja
14	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			1	1	1	1	1	-	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
15	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah			5	5	5	5	5	-	5	5	Capaian sesuai dengan target kinerja
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
17	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12	12	12	12	12	-	12	12	Capaian sesuai dengan target kinerja
18	Jumlah Barang Milik Daerah			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
19	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola			840	840	840	840	840	-	840	840	Capaian sesuai dengan target kinerja
20	Jumlah OPD yang mengelola e-government			58	58	58	58	58	-	58	58	Capaian sesuai dengan target kinerja
21	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			100	100	100	100	100	-	100	100	Capaian sesuai dengan target kinerja
22	Jumlah OPD yang menyelenggarakan			58	58	58	58	58	-	58	58	Capaian sesuai dengan target

	Satu Data Indonesia											kinerja
23	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah			11	11	11	11	11	-	11	11	Capaian sesuai dengan target kinerja
24	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah			1	1	1	1	11	-	1	1	Capaian sesuai dengan target kinerja
			1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100,00	100,00	100,00	100,00	96,61	100,00	100,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		73,00	75,00	85,00	73,91	87,50	75,00	85,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik
			3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		70,43	71,22	71,91	70,43	69,37	71,22	71,91	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

			4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			5. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Capaian Kinerja sesuai dengan target kinerja
			6. Tingkat keamanan informasi pemerintah		55,60	57,80	58,00	55,60	54,88	57,80	58,00	Persentase Capaian Kinerja sudah cukup baik

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.**

### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) 2021-2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia. Masalah utama dalam Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **a) Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara Smart City.**

Secara garis besar pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara di era sekarang ini sangat diperlukan guna pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan pengembangan kota cerdas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirancangnya membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya pengelolaan Sumber Daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi. Pengembangan aplikasi yang ada pada setiap SKPD untuk dapat mengintegrasikan data layanan informasi.

#### **b) Satu Data Layanan untuk Pembangunan Kutai Kartanegara**

Data yang digunakan oleh aplikasi yang saat sekarang dikembangkan di beberapa SKPD belum memiliki keseragaman struktur dikarenakan belum adanya standar baku yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi SKPD dalam membangun/mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan masing masing SKPD.

Kondisi ini menjadikan satu kendala tersendiri dalam proses integrasi data. Untuk itu pemerintah harus memiliki standar baku yang disepakati bersama yang dapat dijadikan patokan dalam setiap pembuatan/pengembangan aplikasi di setiap SKPD.

Integrasi data merupakan sebuah proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari berbagai sumber dalam rangka mendukung management Informasi dan mendukung penggunaan untuk melihat kesatuan data.

Integrasi data mengharuskan semua komponen menggunakan sumber data yang sama yang sudah terverifikasi oleh instansi terkait dan menghindari terjadinya duplikasi atau adanya data ganda.

#### **c) Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Layanan Online**

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui berbagai aplikasi yang bersifat On-Line.

#### **d) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dengan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Setiap informasi publik bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program dan proses serta alasan pembuatan kebijakan publik. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik, seperti yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **e) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Tingginya kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat dewasa ini, dengan difasilitasi oleh kecanggihan teknologi, alat komunikasi, kemudahan akses internet melalui jaringan free WiFi dan jaringan 4G, alat teknologi penunjang kemudahan transaksi dan kemampuan bertukar data digital secara jarak jauh melalui internet menjadi salah satu ciri bahwa masyarakat kita sedang memasuki tahap sebagai masyarakat informasi. Ini adalah salah satu bukti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

## **2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi**

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Kurangnya Sumber Daya Spesifik IT ( Programmer, Engineer Network / Hardware / System, Quality Control )
- Kondisi Infrastruktur IT yang sebagian besar sudah berumur diatas umur Teknis (10-15 tahun)

- Belum optimalnya Sistem Keamanan Informasi
- Belum Terstandarisasinya Perangkat Lunak dan Terintegrasinya Aplikasi (Sistem dan Database)
- Belum optimalnya Fungsi Wali Data (Informasi Satu Data)
- Belum optimalnya fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Capaian Program Nasional/ Internasional, SPM dan MDGs.

Tabel 2.3  
 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG  
 PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
 KEPALA DAERAH

No	Misi dan Program  KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	<b>MISI 1 : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;</b>			

1	Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	<p>1. Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan</p> <p>2. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di Perangkat Daerah</p> <p>3. Masih kurangnya SDM khususnya di Bidang IT</p> <p>4. Masih belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan</p> <p>5. Belum tersedianyan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026</p>	<p>1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi.</p> <p>2. 23 desa masih berstatus blankspot.</p> <p>3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi</p> <p>4. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Sistem Informasi</p>	<p>1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara .</p> <p>3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>
<p><b>MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah</b></p>				
1	Program Pemantapan Konektivitas Wilayah	<p>Masih terdapat desa Blankspot diakibatkan dari tidak meratanya pemabngunan infrastruktur jaringan</p>	<p>1. Tidak meratanya pembangunan menara telekomunikasi oleh stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi.</p> <p>2. 23 desa masih berstatus blankspot.</p> <p>3. Masih kurangnya koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait di Bidang Telekomunikasi</p>	<p>1. Terdapat 21 menara telekomunikasi/tower milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p> <p>2. Telah terbangun 277 menara telekomunikasi/tower milik provider yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara .</p> <p>3. Telah terhubung jaringan internet di 216 desa/kelurahan dari 237 desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>

#### **4. Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Adapun Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan Diskominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara, dan masyarakat kurang optimal;
- Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna.
- Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Belum optimalnya pendataan Statistik Sektoral

Adapun Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dsikominfo Kab. Kutai Kartanegara antara lain :

- Adanya peluang recruitment SDM IT
- Adanya peluang peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
- Adanya peluang optimalisasi Fungsi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara komperhensif
- Perlu adanya pendataan Statistik Sektoral secara komperhensif

#### **5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis**

Dari penjabaran isu – isu penting diatas dapat di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- Perlunya Recruitment Sumber Daya Spesifik IT
- Revitalisasi Infrastruktur dan Perangkat Keras IT serta Penerapan Pengamanan Sistem Informasi
- Membuat Regulasi tentang Standarisasi Perangkat Lunak dan Keras serta Perlakuan Integrasi Sistem dan Database
- Membangun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik secara Komperhensif

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara pada tahun 2025**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan review terhadap

rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara tahun 2025 pada tabel dibawah ini :

**TABEL T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika**

Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisa Kebutuhan					
N O	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	15.984.481.540	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,00 Nilai	16.426.464.836	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000	

						PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
						PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
						PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	50.000.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	150.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>11.006.217.716</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>10.658.201.012</b>	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	984 Orang/Bulan	10.694.925.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Orang/Bulan	10.296.908.848	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	311.292.164	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	311.292.164	

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>105.000.000</b>	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	125.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	KAB. KUTAI KARTANEGARA,	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Layanan</b>	<b>470.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Layanan</b>	<b>480.000.000</b>	

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Luar Daerah,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	200.000.000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	250.000.000	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	200.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3.001.463.824	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	742.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.254.363.824	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Unit</b>	<b>581.800.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Unit</b>	<b>581.800.000</b>	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	131.800.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	

18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	300.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.605.357.333</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		<b>Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>15.690.020.000</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>840 Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>2.605.357.333</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>	<b>840 Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>15.690.020.000</b>	
19	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	75.000.000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tenggarong	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	2 Persen	75.000.000	
20	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	200.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Tenggarong	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	11 Rekomendasi	1.160.000.000	1. Perlunya Tenaga Teknis untuk mengelola Call Center 112, Sewa Aplikasi dan Sosialisasi Call Center 2. Kurangnya peralatan pendukung seperti handy talky untuk optimalisasi petugas call center 112 di lapangan 3. Kebutuhan analisis terhadap isu - isu terkini yang berkembang di media online untuk ditindaklanjuti
21	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Diseminasi Informasi	Tenggarong	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	2 Persen	100.000.000	
22	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong, Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Konten	Kukar	Jumlah Konten Informasi Publik	850 Konten	300.000.000	

23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	12.045.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya peralatan untuk liputan kepala daerah dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah</li> <li>2. Pengadaan Tenaga Ahli Desain Grafis, Videografer</li> <li>3. Perlunya Perjalanan dinas untuk peliputan kegiatan seluruh Perangkat Daerah</li> <li>4. Pentingnya dukungan kendaraan operasional untuk pelaksanaan peliputan di lapangan</li> <li>5. Kerjasama Media</li> <li>6. Dukungan Program Stunting</li> </ol>
24	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	500.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	300.000.000	
25	Layanan Hubungan Media	Tenggarong , Samarinda	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	530.357.333	Relasi Media	Tenggarong , Samarinda	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 laporan	200.000.000	
26	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Tenggarong , Ma Badak, Ma Muntai, Loa Janan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	200 Dokumen	300.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kukar	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	50 Komunitas	1.000.000.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dari KIM dan usulan Musrenbang</li> <li>2. Mendorong dan memberikan motivasi kepada KIM dalam diseminasi informasi dan komunikasi publik</li> </ol>
27	Manajemen Komunikasi Krisis	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	160.020.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Tupoksi IKP</li> <li>2. Baju Kemeja untuk Admin/Pengelola SP4N LAPOR pada OPD</li> </ol>

28	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tenggarong, Ma. Badak, Ma. Kaman	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	-	
29	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tenggarong	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	100.000.000	
30						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Tenggarong	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	16 Orang	250.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>12.033.827.670</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>21.230.787.670</b>	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	7.902.860.670	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100 Sistem Informasi	-	
31	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23 Unit	7.902.860.670	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	4.130.967.000	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mengelola e-government	58 OPD	21.230.787.670	

32	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tenggarong	Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	500.000.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	300.000.000	
33	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.640.688.158	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	59 Perangkat Daerah	12.793.508.828	Program Dedikasi Kukar Idaman Program Pemanapan Konektivitas Wilayah  1.Penyediaan Jaringan Telekomunikasi untuk desa blankspot 2. Menyediakan jaringan internet di Digital University 3. Penyediaan Jaringan Internet untuk desa yang lemah sinyal melalui Radio Link atau Broadband
34	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tenggarong	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	175.000.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Tenggarong	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1Aplikasi	100.000.000	
35						Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tenggarong , Jakarta	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	75.000.000	
36	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jakarta, Tenggarong	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tenggarong , Jakarta	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	59 Unit	250.000.000	

37	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Desa Lamin Telihan, Desa Sepatin, Menamang Kiri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1.265.278.842	-	-	-	-	-	
38	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Yogyakarta	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	6 Dokumen	100.000.000	
39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Samarinda, Tenggarong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Samarinda, Tenggarong	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	150.000.000	Program Dedikasi Kukar Idaman Program DISAPA
40						Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong, Jakarta, Yogyakarta	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	400.000.000	Peningkatan indeks SPBE pada Domain Manajemen SPBE berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SPBE 2023
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	59 Perangkat Daerah	7.062.278.842	1. Meningkatkan keamanan jaringan 2. Menghindari Serangan Cyber di Pusat Data 3. Memfilter lalu lintas jaringan dan memblokir data yang mencurigakan/berbahaya
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>1.450.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>5.050.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5.050.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>58 OPD</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>	<b>58 OPD</b>	<b>5.050.000.000</b>	

41	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	750.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	1.300.000.000	1. Roadmap / Rencana Aksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral diperlukan untuk mendukung Indeks Domain Manajemen SPBE 2. Tindak Lanjut hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Mendukung Indeks Reformasi Birokrasi terkait Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik Sektoral
42	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Yogyakarta, Samarinda	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	130 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	130 Orang	200.000.000	
43	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tenggarong	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	450.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Tenggarong	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	100 Persen	3.250.000.000	1. Notebook/Laptop Tenaga Ahli untuk pengelola Portal Satu Data dan Geospasial Kabupaten Kutai Kartanegara serta mendukung Penguatan Data Kecamatan dan Program Desa Presisi2. Penyusunan Doklumen Indeks Harga Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara yang rilis setiap Bulan selama 12 Bulan dengan lokasi pencacahan di Kecamatan Tenggarong dan kecamatan Loa Janan3. Pelaksanaan kegiatan survei biaya hidup dengan bekerja sama dengan BPS Kab. Kukar selama 12 bulan yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penetapan harga dasar komoditas perhitungan indeks harga pasar yang selama ini belum pernah dilakukan dan hanya menggunakan data dari provinsi dan data sister city
44						Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kegiatan statistik yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	200.000.000	

45						Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Tenggarong	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina Data	1 Dokumen	100.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>700.000.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>700.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>18,97 Persen</b>	<b>700.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>18,97 Persen</b>	<b>700.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>11 OPD</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>11 OPD</b>	<b>500.000.000</b>	
46	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Yogyakarta	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	150.000.000	
47	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	200.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	200.000.000	
48	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	150.000.000	
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota</b>		<b>Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Layanan JKS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota</b>		<b>Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Layanan JKS</b>	<b>200.000.000</b>	

49	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	200.000.000	
<b>Total</b>					<b>32.773.666.543</b>					<b>59.097.272.506</b>	

## 2.5 Penelaahan Program Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Untuk tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada usulan dari Pemangku Kepentingan.

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Lebak Mantan	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
2	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Kupang Baru	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
3	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Sebemban	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
4	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Enggelam	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
5	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Liang Buaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Sedulang	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
7	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Muai	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
8	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Buana Jaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
9	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Liang Buaya	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
10	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Loa Duri Ulu	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
11	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Loa Duri Ulu	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan

12	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Desa Jantur Selatan	Jumlah Tower Repeater	1 Unit	Akan dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan
13	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Desa Salo Palai	Jumlah Sarana Prasarana	1 Paket	Catatan penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana
14	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Desa Sebemban	Jumlah Aplikasi/Website	1 Unit	Silahkan berkoordinasi lebih lanjut untuk pembuatan website desa
15	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Desa Makarti	Jumlah Aplikasi/Website	1 Unit	Silahkan berkoordinasi lebih lanjut untuk pembuatan website desa

## BAB III

### Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
6.	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	Renstra Kemkominfo Tahun 2020 - 2024	

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan atau mensinkronisasi dalam berbagai kebijakan strategis yaitu melalui Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara..**

### **3.2.1 Tujuan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah "Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)".

### **3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

## BAB IV

### Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### 4.1 Program dan Kegiatan

##### a) Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 adalah Visi Bupati Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dilakukan berbagai upaya strategis, salah satu upaya itu dituangkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten kutai Kartanegara. Dalam Sasaran RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 Tujuan dan 4 Sasaran yang sudah ditetapkan melalui turunan Sasaran RPJMD Kabupaten antara lain :

Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE
2. Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE
3. Meningkatkan Kualitas Domain Manajemen SPBE
4. Meningkatkan Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE

##### b) Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan.

Rincian Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Dari 5 (lima) Program diatas, dijabarkanlah ke dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana pagu dari seluruh Program / Kegiatan tersebut pada tahun 2025 sebesar **Rp. 59.097.272.506,- ( Lima puluh sembilan milyar sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam rupiah )**

c) Rumusan Program dan Kegiatan memiliki beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Adanya Penyesuaian Output Indikator Sub Kegiatan
- b. Adanya perubahan subkegiatan yang ada di SIPD
- c. Adanya pemetaan subkegiatan yang baru dari subkegiatan lama yang ada di Renstra dengan subkegiatan baru yang ada di SIPD
- d. Adanya tambahan subkegiatan baru menyesuaikan dengan analisis kebutuhan dan paket pekerjaan

d) Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**TC 33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan Kepmen 050-5889	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,22 Nilai				3,29 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE		3,11 Nilai				3,16 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE		3,40 Nilai				3,45 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE		3,20 Nilai				3,25 Nilai	
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE		3,14 Nilai				3,25 Nilai	
xxx	<b>[URUSAN] X NON URUSAN</b>								
2.16.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>84,00 Nilai</b>	<b>16.426.464.836</b>			<b>84,00 Nilai</b>	<b>15.984.481.540</b>
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>10 Dokumen</b>	<b>1.000.000.000</b>			<b>18 Dokumen</b>	<b>200.000.000</b>
2.16.01.2.01.0008	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Data	250.000.000	APBD		-	-

2.16.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	3 Dokumen	450.000.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	3 Laporan	50.000.000	APBD		3 Laporan	100.000.000
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	4 Laporan	150.000.000	APBD		-	-
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>		<b>2 Laporan</b>	<b>10.658.201.012</b>			<b>2 Laporan</b>	<b>11.006.217.716</b>
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	888 Orang/bulan	10.296.908.848	APBD		888 Orang/bulan	10.694.925.552
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1 Laporan	25.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	4 Laporan	311.292.164	APBD		4 Laporan	311.292.164
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	APBD		-	-
<b>2.16.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>		<b>4 Dokumen</b>	<b>105.000.000</b>			<b>4 Dokumen</b>	<b>125.000.000</b>
2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1 Laporan	50.000.000	APBD		-	-

2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	2 Laporan	30.000.000	APBD		2 Laporan	125.000.000
<b>2.16.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000.000</b>
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	10 Orang	150.000.000	APBD		10 Orang	150.000.000
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah</b>		<b>5 Layanan</b>	<b>480.000.000</b>			<b>5 Layanan</b>	<b>470.000.000</b>
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	10.000.000	APBD		-	-
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	100.000.000	APBD		1 Paket	100.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta, Semua Kecamatan	1 Paket	50.000.000	APBD		1 Paket	50.000.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	50 Laporan	200.000.000	APBD		50 Laporan	200.000.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	1 Dokumen	70.000.000			1 Dokumen	70.000.000
<b>2.16.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>450.000.000</b>
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	1 Unit	250.000.000	APBD		1 Unit	250.000.000
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	15 Unit	200.000.000	APBD		15 Unit	200.000.000
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>3.001.463.824</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>3.001.463.824</b>
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	1 Laporan	5.100.000	APBD		1 Laporan	5.100.000

2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	1 Laporan	742.000.000	APBD		1 Laporan	742.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3 Laporan	2.254.363.824	APBD		3 Laporan	2.254.363.824
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>		<b>100 Unit</b>	<b>581.800.000</b>			<b>100 Unit</b>	<b>581.800.000</b>
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	22 Unit	131.800.000	APBD		22 Unit	131.800.000
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	1 Unit	150.000.000	APBD		1 Unit	150.000.000
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong	15 Unit	300.000.000	APBD		15 Unit	300.000.000
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>100 Persen</b>	<b>15.690.020.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>2.605.357.333</b>
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola</b>		<b>840 Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>15.690.020.000</b>			<b>840 Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>2.605.357.333</b>
2.16.02.2.01.0014	RELASI MEDIA	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Tenggarong, Samarinda	5 Laporan	200.000.000	APBD		5 Laporan	200.000.000
2.16.02.2.01.0015	KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Kutai Kartanegara	50 Komunitas	1.000.000.000	APBD		50 Komunitas	300.000.000
2.16.02.2.01.0016	DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tenggarong	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000

2.16.02.2.01.0017	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Kutai Kartanegara	5 Permohonan	300.000.000	APBD		5 Permohonan	500.000.000
2.16.02.2.01.0018	SOSIALISASI PERATURAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Tenggarong	2 Persentase	75.000.000	APBD		1 Persen	75.000.000
2.16.02.2.01.0019	MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Tenggarong	11 Rekomendasi	1.160.000.000	APBD		12 Rekomendasi	200.000.000
2.16.02.2.01.0020	DISEMINASI INFORMASI	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Tenggarong	2 Persentase	100.000.000	APBD		2 Persentase	100.000.000
2.16.02.2.01.0021	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Tenggarong	5 Media	12.045.000.000	APBD		5 Media	530.357.333
2.16.02.2.01.0022	PENYUSUNAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Tenggarong	1 Dokumen	160.020.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.16.02.2.01.0023	PENYUSUNAN KONTEN	Jumlah Konten Informasi Publik	Kukar	850 Konten	300.000.000	APBD		850 Konten	300.000.000
2.16.02.2.01.0024	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Tenggarong	16 Orang	250.000.000			16 Orang	250.000.000
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>21.230.787.670</b>			<b>100 Persen</b>	<b>12.033.827.670</b>
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD</b>		<b>58 OPD</b>	<b>21.230.787.670</b>			<b>58 OPD</b>	<b>12.033.827.670</b>
2.16.03.2.02.0015	FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Samarinda, Tenggarong	1 Laporan	150.000.000		<b>Program Dedikasi Kukar Idaman 1. Program DISAPA</b>	1 Laporan	150.000.000

2.16.03.2.02.0018	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Tenggarong	2 Dokumen	300.000.000	APBD		2 Dokumen	300.000.000
2.16.03.2.02.0019	KOORDINASI PELAKSANAAN MANAJEMEN SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Tenggarong, Jakarta, Yogyakarta	1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0020	PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Tenggarong	1 Aplikasi	100.000.000	APBD		1Aplikasi	100.000.000
2.16.03.2.02.0023	KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Tenggarong, Jakarta	59 unit	250.000.000	APBD		59 Unit	400.000.000
2.16.03.2.02.0024	PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	59 Perangkat Daerah	7.062.278.842	APBD		59 Perangkat Daerah	4.487.278.842
2.16.03.2.02.0025	KOORDINASI PEMANFAATAN PORTAL PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERINTEGRASI	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Tenggarong, Jakarta	2 Layanan	75.000.000	APBD		2 Layanan	75.000.000
2.16.03.2.02.0028	KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Luar Daerah,	6 Dokumen	100.000.000	APBD		6 Dokumen	100.000.000
2.16.03.2.02.0030	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Kutai Kartanegara	59 Perangkat Daerah	12.793.508.828	APBD	<b>Program Dedikasi Kukar Idaman 17. Program Pemantapan Konektivitas Wilayah</b>	59 Perangkat Daerah	6.321.548.828
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				<b>5.050.000.000</b>				<b>1.450.000.000</b>
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>		<b>100 Persen</b>	<b>5.050.000.000</b>			<b>100 Persen</b>	<b>1.450.000.000</b>

<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia</b>		<b>58 OPD</b>	<b>5.050.000.000</b>			<b>58 OPD</b>	<b>1.450.000.000</b>
2.20.02.2.01.0007	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	130 Orang	200.000.000	APBD		130 Orang	200.000.000
2.20.02.2.01.0008	PENINGKATAN PERAN STATISTIK SEKTORAL TERHADAP SISTEM STATISTIK NASIONAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Luar Daerah, Kab. Kutai Kartanegara	100 Persentase	1.300.000.000	APBD		100 Persen	750.000.000
2.20.02.2.01.0009	PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK SEKTORAL	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Tenggarong	100 Persentase	3.250.000.000	APBD		100 Persen	200.000.000
2.20.02.2.01.0010	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
2.20.02.2.01.0011	PELAKSANAAN PROSES BISNIS STATISTIK SEKTORAL SESUAI STANDAR	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				<b>700.000.000</b>				<b>850.000.000</b>
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>18,97 Persen</b>	<b>700.000.000</b>			<b>18,97 Persen</b>	<b>850.000.000</b>
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>11 OPD</b>	<b>500.000.000</b>			<b>11 OPD</b>	<b>650.000.000</b>
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	150.000.000	APBD	-	2 Laporan	150.000.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	200.000.000	APBD		2 Laporan	200.000.000
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	150.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	150.000.000

2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Tenggarong	-	-	APBD		1 Dokumen	150.000.000
<b>2.21.02.2.02</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah</b>		<b>1 Layanan JKS</b>	<b>200.000.000</b>			<b>1 Layanan JKS</b>	<b>200.000.000</b>
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Tenggarong	1 Perangkat Daerah	200.000.000	APBD		1 Perangkat Daerah	200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>59.097.272.506</b>	<b>-</b>			<b>32.923.666.543</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **4.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

#### **4.2. Kaidah - kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja (Renja) PD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

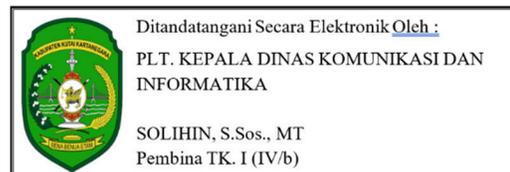
1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indicator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indicator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean government and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

#### 4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berlaku sejak tanggal di tetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tenggarong, Juli 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Telp (0541) 661350, Fax (0541) 664507  
Website : [diskominfo.kukarkab.go.id](http://diskominfo.kukarkab.go.id) E-mail : [diskominfo@kukarkab.go.id](mailto:diskominfo@kukarkab.go.id) Kode Pos 75511

## KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : P-20/DISKOMINFO/000.7.2/01/2024

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;  
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 );  
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);  
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;  
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional  
11. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

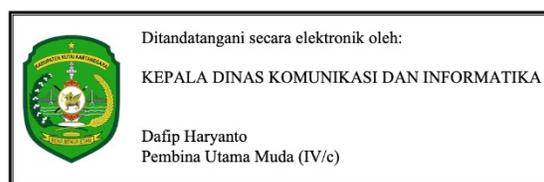
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dan menyusun serta membantu segala yang dibutuhkan baik data maupun informasi serta kebutuhan lainnya dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 30 Januari 2024



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KAB. KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-20/DISKOMINFO/000.7.2/01/2024  
TANGGAL : 30 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	DAFIP HARYANTO, S.Sos, M.Si Nip. 19700924 199003 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	SOLIHIN, S.Sos. MT Nip. 19721029 199102 1 001	Sekretaris	Ketua
3.	MAULIDA SAVITRI, SP Nip. 19790203 200801 2 025	Plt. Kasubbag Penyusunan Program Dan Keuangan	Sekretaris
4.	ERY HARIYONO, SE, M.Si Nip. 19791029 201001 1 004	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
5.	H. UPA PERMANA, SE.M.Si Nip. 19760424 200012 1 003	Kepala Bidang E- Government	Anggota
6.	H. SURYA ADMAJA, SP Nip. 19700402 199912 1 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Layanan Publik	Anggota
7.	H. ASDI, SE. MAP Nip. 19690313 200112 1 001	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	HERMAWAN, S.Hut. Nip. 19770408 199903 1 003	JF Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
9.	BUDIAN NOOR Nip. 19830815 201001 1 035	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

